Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

INDONESIA INTERNET SERVICE PROVIDER ASSOCIATION

BULLETIN APJII

EDISI AGUSTUS 2022

apjii.or.id

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

INDONESIA INTERNET SERVICE PROVIDER ASSOCIATION

BULLETIN APJII

EDISI AGUSTUS 2022

Daftar Isi

3 **APJII Siap Bantu Pemerataan Layanan Telekomunikasi dan Menjaga Ruang Siber RI**

6 **Ini Kata Asosiasi Penyelenggara Internet Soal Sejumlah Web Asing Diblok Kominfo**

9 **WIR Group dan APJII Tampilkan Kemajuan Transformasi Digital RI di Pertemuan DEWG**

13 **Ketum APJII: 77 Persen Orang Indonesia Kini Terhubung ke Internet, Perlu Literasi Digital**

15 **APJII Jalin Kolaborasi Dengan AtriaDC**

illustration: envanto elements

APJII Siap Bantu Pemerataan Layanan Telekomunikasi dan Menjaga Ruang Siber RI

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengimbau dan mendorong kepada seluruh perusahaan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia (RI) untuk terus membantu pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dalam pemerataan akses telekomunikasi.

Mereka diharapkan berkontribusi dalam memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat seluas-luasnya di wilayah Tanah Air. Karena, saat ini, layanan telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat.

Walaupun sudah 77 tahun merdeka, masih ada desa di Indonesia yang belum “merdeka” dalam layanan Telekomunikasi. Mengacu data Kemenkominfo akhir 2019, sempat ada 12.548 desa belum

bisa mengakses layanan telekomunikasi, terutama 4G. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.113 desa berada di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T).

Hingga akhir 2022, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo memperkirakan baru bisa membangun 6.000 BTS 4G. Rinciannya, Bakti telah membangun 4.026 BTS pada 2020-2021, dan hingga akhir 2022, Bakti akan membangun 1.974 tower BTS 4G lagi.

“Di dalam konstitusi, negara juga menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Karena itu, APJII siap mendukung program pemerataan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Arif, dalam pernyataannya, Kamis (18/8/2022).

Jika dibutuhkan, lanjut dia, APJII pun siap memberikan kontribusi terbaiknya bagi negara maupun masyarakat Indonesia dalam membantu upaya terjadinya pemerataan layanan telekomunikasi yang berkeadilan. Hal tersebut akan dilakukan tanpa kecuali, termasuk di daerah 3T.

Ruang Siber

Arif melanjutkan, asosiasi yang dipimpinnya juga siap berkontribusi dalam tata kelola ruang siber. APJII mendukung upaya pemerintah untuk menata dan menjaga ruang siber atau digital di Indonesia. Tujuannya untuk melindungi seluruh kepentingan negara dan masyarakat Indonesia.

Dia berasalasan bahwa kedaulatan siber yang hakiki dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Meski Indonesia sudah merdeka 77 tahun, hingga saat ini, kedaulatan ruang digital atau siber di Indonesia masih terbilang rendah.

Hal tersebut dapat dilihat dari masih minimnya aplikasi-aplikasi lokal mumpuni dan digunakan secara luas yang dikembangkan oleh pemuda dan pemudi Indonesia. Masyarakat masih lebih banyak mengandalkan layanan aplikasi atau layanan konten melalui jaringan internet (over-the-top/OTT) global.

Arif pun berpendapat bahwa mempertahankan kedaulatan siber sama saja dengan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Inndonesia (NKRI). Sebagai salah satu komponen anak bangsa, APJII pun siap membantu dan mendukung pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber.

“Sebab, kedaulatan siber merupakan wujud hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Dengan adanya pemerataan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia dan terwujudnya kedaulatan siber, Arif berharap, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat. Hal ini sama seperti spirit HUT Indonesia ke-77 tahun ini, yakni Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

illustration: envanto elements

Ini Kata Asosiasi Penyelenggara Internet Soal Sejumlah Web Asing Diblok Kominfo

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif prihatin dengan rencana demo atau unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) terkait ketidakpuasan atas pemblokiran sejumlah layanan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang belum mendaftar.

Arif mengakui, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya dilindungi dengan UU. Namun dalam menyampaikan aspirasi, setiap masyarakat juga harus mengikuti koridor perundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya unjuk rasa atau demo yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan secara santun.

“Rencana demo dengan melempar botol yang berisi urin menurut

kami bukan hal yang patut dilakukan. Jika kita ingin dianggap sebagai masyarakat yang beradab, seharusnya demo seperti itu tak harus dilakukan. Sampaikan saja aspirasi masyarakat ke Kominfo dengan cara yang lazim dan sopan. Pasti Kominfo akan menyerap aspirasi tersebut," ungkap Arif dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (2/8/2022).

Arif menyampaikan, APJII mendukung penuh penerapan regulasi pendaftaran PSE Lingkup Privat yang dilakukan Kominfo. Sebab regulasi pendaftaran PSE Lingkup Privat ini sudah ada sejak tahun 2020 dan batas waktu pendaftarannya sudah mengalami perpanjangan di tahun 2021. "Sejatinya PSE Lingkup Privat sudah memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti regulasi yang ada. Kominfo telah mengumumkan melalui Surat Edaran Menkominfo No. 3 tahun 2022 tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang ditandatangani 14 Juni 2022, di mana batas waktu pendaftaran PSE Lingkup Privat domestik maupun luar negeri adalah tanggal 20 Juli 2022," paparnya.

Regulasi pendaftaran PSE Lingkup Privat ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronikdan Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan perubahannya melalui Peraturan Menkominfo Nomor 10 tahun 2021.

"APJII mendukung penuh regulasi pendaftaran PSE Lingkup Privat yang dikeluarkan oleh Kominfo. Ini masalah kedaulatan NKRI. Sehingga APJII mendukung penerapan PP regulasi tersebut. APJII meyakini sanksi administratif bukan tujuan dari regulasi yang dibuat Pemerintah. Sanksi administratif ditujukan untuk menegakan regulasi secara konsisten dan berkeadilan.

Sehingga kami mendukung sanksi administratif yang dilakukan oleh Kominfo terhadap PSE yang belum mengikuti regulasi yang ada,"ujar Arif.

Agar publik tak menganggap sanksi administratif yang diberlakukan tebang pilih, APJII meminta agar Kominfo terus melakukan pemblokiran konten-konten internet yang melanggar hukum, seperti perjudian dan pornografi.

"APJII mengerti saat ini masih banyak konten yang melanggar hukum yang masih bisa diakses menggunakan VPN, tentunya ini adalah tantangan namun yang terpenting semua PSE Lingkup Privat harus comply dengan regulasi" pinta Arif.

Agar kedaulatan cyber di Indonesia dapat terjaga dengan baik, Arif mengatakan bahwa seluruh anggota APJII siap membantu dan mendukung upaya Pemerintah melalui Kominfo untuk menerapkan regulasi yang ada.

"APJII siap menjadi garda terdepan dalam menegakan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah melalui Kominfo. Sebagai bangsa yang besar seluruh komponen masyarakat Indonesia harus mendukung tegaknya regulasi. Termasuk regulasi disektor telekomunikasi dan informatika," pungkas Arif.

illustration: doc APJII

WIR Group dan APJII Tampilkan Kemajuan Transformasi Digital RI di Pertemuan DEWG

JAKARTA – PT WIR Asia Tbk (WIR Group/WIRG) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menampilkan gambaran kemajuan transformasi digital Indonesia dari berbagai sektor pada ajang pertemuan Digital Economy Working Group Meeting (DEWG) Keempat dan Digital Economy Ministerial Meeting (DEMM) yang berlangsung di Mulia Resort Hotel, Bali, 28 Agustus 2022.

WIR Group adalah perusahaan teknologi berbasis augmented reality (AR), virtual reality (VR, dan artificial intelligence (AI) terkemuka di Asia Tenggara dan telah mendapatkan lima paten global untuk AR yang teregistrasi pada patent cooperation treaty (PCT). Adapun APJII adalah organisasi yang menaungi seluruh internet service provider dan pengguna nomor internet protocol (IP) publik di Indonesia,

Kerja sama WIR Group dan APJII ini merupakan langkah lanjutan setelah keduanya menandatangani nota kesepahaman untuk menampilkan kilasan konsep dari metaverse Indonesia di DEWG keempat, yang mencerminkan terwujudnya infrastruktur berbasis web 3.0 serta dunia metaverse di Indonesia.

“Kolaborasi ini merupakan langkah sinergis untuk menunjukkan kepada para peserta DEWG Keempat dari negara-negara G20 bahwa Indonesia telah memiliki infrastruktur andal yang mendukung sekaligus merepresentasikan kesiapan platform industri teknologi berbasis web 3.0 di Indonesia,” ujar Muhammad Arif, ketua umum APJII, dalam keterangan resmi, Senin (29/8/2022).

Dalam pertemuan DEWG Keempat dan DEMM, Industry Task Force (ITF) akan menampilkan adopsi teknologi digital Indonesia kepada seluruh delegasi dari negara anggota G20. Dalam showcase ini, ITF akan menampilkan gambaran transformasi digital Indonesia dari berbagai sektor yang meliputi empat pilar transformasi digital, yaitu infrastruktur digital (digital infrastructure), pemerintahan digital (digital governance), ekonomi digital (digital economy) dan masyarakat digital (digital society) melalui 12 booth dari 12 perusahaan dan dua instansi pemerintah.

Menurut Muhammad Arif, metaverse yang berbasis teknologi AR, VR, dan AI akan memerlukan kesiapan jaringan dan kapasitas yang mampu mendukung platform internet berbasis teknologi Web 3.0. “Kami di APJII tentunya akan selalu memberikan dukungan untuk tumbuhnya ekosistem dan memberikan kontribusi pengembangan teknologi web 3.0 guna mendukung platfom Metaverse Indonesia yang akan ditampilkan saat Presidensi G20,” ujar dia.

Dia menyatakan, merupakan tanggung jawab APJII untuk

berupaya semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian kegiatan DEWG yang menjadi showcase kemajuan adopsi teknologi digital metaverse di Indonesia dan pertemuan G20 dapat berjalan mulus.

Lebih lanjut Muhammad Arif menjelaskan, APJII memiliki peran penting dalam menghadirkan interkonektivitas, mengembangkan mekanisme operasional, teknis dan administratif untuk menjamin distribusi sumber daya internet di Indonesia.

“Kami di APJII dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan jaringan dan koneksi internet, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan teknologi digital dan selalu in-tune dengan tren global serta memperoleh benefit yang maksimal,” jelas Muhammad Arif.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang juga Ketua Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Mira Tayyiba menambahkan, kerja sama berbagai pihak, seperti WIR Group dan APJII sebagai pelaku industri digital merupakan salah satu bentuk kolaborasi untuk pengembangan ekosistem digital nasional dan mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.

“Teknologi digital telah menjadi komponen utama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan,” ujar Mira Tayyiba.

Sementara International Bussines & Government Relations Director WIR Group Yasha Chatab menjelaskan, langkah sinergis WIR Group dan APJII ini dapat memberikan benefit yang maksimal. Kerja sama ini merupakan langkah yang strategis karena dengan

hadirnya platform teknologi berbasis Web 3.0 ini akan mendukung upaya perseroan dalam pengembangan metaverse Indonesia.

illustration: envanto elements

Ketum APJII: 77 Persen Orang Indonesia Kini Terhubung ke Internet, Perlu Literasi Digital

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menyebut, 77,02 persen masyarakat Indonesia kini merupakan pengguna internet.

Arif mengatakan, jika dinyatakan dengan angka, per Juni 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta user. Angka ini naik sekitar 50 juta pengguna dari jumlah pengguna di tahun 2020.

“Era pandemi mendorong masyarakat menggunakan internet, internet menjadi kebutuhan primer karena dalam waktu singkat ada 50 juta pengguna internet baru di Indonesia,” tutur Arif dalam acara pembukaan Digital Transformation Indonesia Conference and Expo 2022, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Menurut Arif, berdasarkan data APJII, perkembangan digital di Indonesia tidak bisa terlepas dari perkembangan infrastruktur di Indonesia. Sekadar informasi, saat ini jumlah ISP (internet service provider) di Indonesia mencapai 780-an perusahaan dan ada lebih dari 2.800 pemilik IP address di Indonesia.

Arief mengatakan, bertambahnya jumlah pengguna internet Indonesia ditambah dengan makin banyaknya penyedia ISP, perlu diimbangi dengan hal-hal produktif.

“Kita tentu tidak ingin internet dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif. Oleh karenanya, perlu mendorong literasi digital agar internet bisa dipakai untuk hal-hal yang berguna, seperti bekerja, belajar, dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut Arif, digelarnya Digital Transformation Indonesia Convension and Expo (DTI-CX) yang menghadirkan 15 kegiatan konferensi dengan 80-an narasumber serta pameran solusi teknologi dari perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia dan global bisa membantu literasi digital sekaligus mempercepat agenda transformasi digital.

“DTI mendukung akselerasi dan pemerataan internet serta peningkatan pemanfaatan internet. Saat ini adalah eranya kolaborasi. Baik itu asosiasi swasta dan pemerintah harus berjalan bersama-sama agar proses transformasi digital berjalan dengan baik,” katanya.

illustration: doc APJII

APJII Jalin Kolaborasi Dengan AtriaDC

JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan PT PCDC Propco One (AtriaDC) berkolaborasi dengan PT PCDC Propco One (AtriaDC) demi menghadirkan Indonesia Internet Exchange (IIX).

Kolaborasi itu terjadi setelah Ketua Umum APJII Muhammad Arif dan Presiden Direktur AtriaDC Angelo Syailendra menandatangani nota kesepahaman di Meatsmith, di Jakarta Selatan, Rabu (24/8) kemarin.

Syailendra mengatakan kehadiran koneksi IIX akan memudahkan anggota APJII dan seluruh pelanggan, terhubung satu dengan yang lainnya di ekosistem exchange AtriaDC. Baca Juga: Pengguna Internet Indonesia Naik Signifikan, APJII Harap Pemerintah Gunakan Momentum G20 “Kami siap memfasilitasi kebutuhan anggota APJII maupun pelanggan dari berbagai industri untuk mendapatkan interkoneksi langsung ke IIX di

dalam fasilitas AtriaDC," ujar dia dalam keterangan persnya, Kamis (25/8).

Diketahui, AtriaDC berkomitmen untuk menghadirkan layanan interkoneksi dengan IIX yang rendah latensi. Hal itu pun berpotensi memenuhi kebutuhan infrastruktur digital yang bisa menjangkau kebutuhan semua industri. Baca Juga: APJII Berkomitmen Memperluas Jaringan Internet Demi Penguatan Ekonomi Digital Pelanggaran perlu melakukan interkoneksi ke Gedung Cyber 1 di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tetapi kini berubah. Sebab, pelanggan makin dipermudah dengan hanya menghubungkan ke perangkat APJII-IIX yang sudah tersedia di AtriaDC.

Asosiasi
Penyelenggara
Jasa
Internet
Indonesia

INDONESIA INTERNET SERVICE PROVIDER ASSOCIATION

BULLETIN APJII

EDISI AGUSTUS 2022

APJII APJII APJII APJII apjii.or.id

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
Gedung Cyber Lt. 11 Jl. Kuningan Barat No. 8,
Kuningan Barat-Mampang Prapatan
Jakarta 12710 Indonesia
Fax +62-21 5296 0635 Email sekretariat@apjii.or.id